



Buletin Parlementaria

Penanganan Mudik Lebaran 2023 Berlangsung Sukses



Nomor 1243/IV/IV/2023 • April 2023



9 772614 339005



3 Idulfitri
Momentum
Pererat
Silaturahmi
Keluarga dan
Sesama Anak
Bangsa



4 Kunjungan
Pengusaha
Jepang ke IKN,
Gobel: Bentuk
Keseriusan
Berinvestasi di IKN



Penanganan Mudik Lebaran 2023 Berlangsung Sukses



FOTO: EKI/PDI

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae bersama rombongan tim saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Pasar Senen, Jumat (14/4/2023).

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengapresiasi kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi mudik lebaran 2023 via kereta api. Hal itu diungkapkan Ridwan Bae usai menerima penjelasan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun Pasar Senen, Jumat (14/4).

"Setelah masa pandemi ini kita lihat kesiapan mereka begitu siap, dalam artian bahwa dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mereka telah menyiapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada (tahun sebelumnya)," ungkap Ridwan.

Ridwan menekankan bahwa Komisi V berharap seluruh *stakeholder* yang melaksanakan atau mengkoordinasi para pemudik,

baik yang menggunakan kereta api, kendaraan umum atau pribadi, pesawat ataupun kapal harus menjaga para pemudik dengan baik, terutama keselamatannya, terutama keselamatannya.

"Yang utama itu keselamatan para pemudik, yang kedua adalah keamanannya, dan yang ketiga itu adalah persoalan kenyamanan mereka," tegas Ridwan.

”

YANG UTAMA ITU KESELAMATAN PARA PEMUDIK, YANG KEDUA ADALAH KEAMANANNYA, DAN YANG KETIGA ITU ADALAH PERSOALAN KENYAMANAN MEREKA.

Secara keseluruhan, ia mengaku bersyukur pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR telah mematangkan jalan nasional sepanjang 4812 kilometer. Menurutnya hal itu bisa menjadi indikator yang perlu diapresiasi bahwa pemerintah melakukan upaya terbaik menyiapkan mudik lebaran.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Basarnas agar memperhatikan kesehatan petugasnya yang bekerja di lapangan saat penyelenggaraan mudik lebaran 2023. "Jangan sampai kita berikan tugas teman-teman lapangan, sementara mereka tidak dibekali dengan vitamin dan sebagainya. Padahal, (mereka) bertugas selama 24 jam," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana menegaskan faktor keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, dan kualitas pelayanan jadi poin penting dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023. Hal itu disampaikan Eddy saat mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi V dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur mudik di Stasiun Bandung dan Terminal Leuwi Panjang.

Peninjauan tersebut difokuskan pada pengawasan persiapan angkutan Lebaran 2023, baik penyelenggaraan angkutan di sektor darat, baik melalui moda kereta api, maupun moda transportasi umum (bus) maupun transportasi pribadi seperti mobil dan motor yang melewati jalan raya. Dikarenakan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan dan lintasan utama arus mudik Lebaran 2023. **eki/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





Idulfitri Momentum Pererat Silaturahmi Keluarga dan Sesama Anak Bangsa

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan ucapan Selamat Idulfitri 1444 Hijriah kepada seluruh umat Muslim. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk terus bersatu dalam semangat silaturahmi dan gotong-royong.

"Sebulan berpuasa, *insyaallah* menjadikan kita sebagai pribadi yang takwa, sabar, serta tawakal. Kini tibalah hari kemenangan, hari suci Idulfitri," ucap Puan, Jumat (21/4). Puan mengajak masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan momen Lebaran sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan sesama anak bangsa.

Menurut Puan, kehangatan silaturahmi akan mempererat persatuan bangsa dan negara. "Tunaikan nilai-nilai ibadah Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa membantu mereka yang membutuhkan," ungkapnya.

Puan juga mengajak masyarakat untuk merayakan Idulfitri dengan penuh kegembiraan. Apalagi saat

ini Indonesia sudah tidak berada dalam status PPKM, sehingga masyarakat bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan lebaran.

Meski begitu, masyarakat diminta tetap menjaga protokol kesehatan saat beraktivitas di momen Lebaran. Puan juga mengingatkan, Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyiapkan skenario terbaik apabila terjadi kerumunan di berbagai titik selama libur lebaran. "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. *Minal Aidzin Wal Faizin*, mohon maaf lahir batin," tutup Puan. **ann/rdn**

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.



Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Kunjungan Pengusaha Jepang ke IKN, Gobel: Bentuk Keseriusan Berinvestasi di IKN



FOTO: AZK/PDI

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima rombongan pengusaha Jepang yang telah berkunjung ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara di rumah dinasny.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima rombongan pengusaha

Jepang yang telah berkunjung ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara di rumah dinasny Minggu kemarin (2/4) di Jakarta. Hal ini merupakan bentuk realisasi atas pertemuan Gobel sebelumnya di Tokyo, Jepang. Pada hari Sabtu sebelumnya, (1/4), rombongan pengusaha Jepang diketahui melakukan kunjungan ke titik nol lokasi pembangunan IKN di Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.

Delegasi pengusaha Jepang dipimpin Hiroto Izumi, penasihat senior *The Building Center of Japan, Japan Bank for International Cooperation*. Kunjungan mereka ini merupakan kelanjutan dari kunjungan delegasi Indonesia ke Jepang pada akhir Februari 2023. Delegasi Indonesia saat

itu dipimpin Gobel yang didampingi Kementerian PUPR dan Otorita IKN.

Dalam kunjungan ini, selain ke titik nol, para pengusaha Jepang itu juga berkunjung ke proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi yang akan menyuplai kebutuhan air IKN. Mereka juga berkunjung ke proyek pembangunan Istana Presiden dan ke hunian para pekerja konstruksi. "Ini menunjukkan keseriusan Jepang untuk berinvestasi dan terlibat dalam pembangunan IKN dan sebagai wujud persahabatan dan saling percaya antara kedua negara," kata Gobel kepada **Parlementaria**, Selasa (4/4).

Gobel mengatakan, pembangunan IKN memiliki konsep ramah lingkungan dan juga *smart city*. Lebih lanjut Gobel mengatakan, pembangunan IKN selain untuk mengurangi beban ekonomi dan bebas sosial yang ditanggung Jakarta dan kota-kota lain di Jawa, juga sekaligus menciptakan pemerataan

ekonomi bagi kawasan timur Indonesia.

Dengan demikian, katanya, pembangunan dan pemindahan IKN ini akan meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Yang juga tak kalah strategisny adalah konsep IKN ini akan menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia, khususnya soal konsep ramah lingkungan dan *smart city*," terang Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Gobel berharap publik tak terpaku pada sikap politik dalam melihat pembangunan dan pemindahan IKN ini. "Tapi lihat sisi sosial, ekonomi, dan hal-hal strategis lainnya bagi masa depan Indonesia. Ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi muda Indonesia dalam membangun optimisme dan nilai-nilai yang bersifat progresif serta positif. Kita harus terbuka dan objektif dalam melihat IKN ini," pungkasnya. **azk/aha**



Komisi I Resmi Tetapkan 5 Calon Dewas TVRI Terpilih



FOTO: JKA/PDT

Ketua Komisi I DPR RI Meutya saat konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Komisi I DPR RI secara resmi telah menetapkan lima (5) nama calon Dewan Pengawas (Dewas) TVRI terpilih periode 2022-2027. Keputusan tersebut diambil usai Komisi I melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 calon anggota Dewas TVRI periode 2022-2027 rapat internal Komisi I yang mencakup 3 unsur yaitu unsur masyarakat, unsur TVRI, unsur pemerintah dan dilaporkan juga bahwa telah dilakukan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

Adapun kelima nama calon dewas TVRI terpilih tersebut yaitu Agnes Irwanti (unsur masyarakat), Agus Sudibyo (unsur pemerintah), Danang Sangga Buwana (unsur masyarakat), Hardly Stefano

Fenelon Pariela (unsur masyarakat) dan Sifak (unsur TVRI). Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya saat konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

"Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 calon anggota Dewas TVRI periode 2022-2027, Komisi I melaksanakan rapat intern Komisi I, baru saja selesai, untuk memutuskan 5 calon anggota dewas TVRI Pusat periode 2022-2027 yang mencakup 3 unsur yaitu unsur masyarakat, unsur TVRI, unsur pemerintah dan dilaporkan juga bahwa telah dilakukan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat," ujar Meutya.

Selain itu, ungkapnya, Komisi I DPR RI juga telah memilih dan menetapkan 5 calon cadangan anggota dewas TVRI periode

2022-2027 sebagai calon pergantian antar waktu anggota Dewas TVRI berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun nama-namanya: Setiabudi (Unsur Masyarakat); Markus RA Prasetyo (Unsur Masyarakat); Zagia Ramallah (Unsur Masyarakat); Muhammad (Unsur Pemerintah); Rini Padmirehatta (Unsur TVRI).

Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewas TVRI periode 2022-2027 kepada rapat Badan Musyawarah DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Tahap berikutnya, sebut Meutya, Komisi DPR RI akan melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut untuk dapat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. Supaya dapat ditetapkan oleh presiden sebagai Dewas LPP TVRI. Komisi I berharap calon anggota Dewas terpilih untuk dapat melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggungjawab.

"Serta senantiasa menjaga moralitas, integritas dan independen serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Demikian kami ucapkan terimakasih atas perhatian dari teman-teman media dan juga publik yang telah memberi masukan selama proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung," tutup Legislator Fraksi Partai Golkar itu.

pun/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi I dan Pemerintah Sepakat Bahas Perubahan UU ITE



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mewakili Komisi I DPR RI untuk menyetujui perubahan UU ITE dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023).

U sai mendengarkan pandangan dari berbagai fraksi. Komisi I DPR RI menyatakan persetujuan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rencananya, pembahasan tersebut dilanjutkan pada periode Masa Persidangan ke-V agar memuat materi-materi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mewakili Komisi I DPR RI untuk menyetujui perubahan UU ITE dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023). Dirinya turut menyampaikan sejumlah

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas mendatang.

"Kami sampaikan bahwa jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri dari atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi serta DIM Penjelasan sebanyak 26 DIM," ucap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Pemerintah telah membentuk Panja Pemerintah guna membahas perubahan UU ITE. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, mewakili pemerintah, menyatakan siap menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan. Panja, jelasnya,

akan dipimpin oleh Ditjen APTIKA Kominfo dan Ditjen Peraturan Perundangan KemenkumHAM. Selama pembahasan juga turut melibatkan Tim Siber Polri.

"Pemerintah siap untuk menindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan penetapan revisi Undang-Undang ITE ini dengan cepat. Melalui Keputusan Menkominfo Nomor 120 tahun 2023, Pemerintah telah membentuk Panja Pemerintah dalam pembahasan yang dimaksud. Secara umum, (perubahan) UU ITE akan memuat dua materi pokok yakni penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan pengaturan tentang *cybercrime* yang merujuk pada *Budapest Convention on Cybercrime* serta memperbarui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana," pungkas Johnny. **ts/rdn**



Konflik Agraria Adalah Buah Ketidakadilan Struktural



FOTO: SSB/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal saat memimpin rapat Kunker Komisi II DPR RI di Kanwil BPN Sumut, Selasa (4/4/2023).

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI melakukan pengawasan tentang pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan Tim Komisi II ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Dalam persoalan pertanahan, Komisi II memandang ketimpangan dan ketidakadilan atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut, inilah sebagai penyebab akar konflik agraria.

Menurutnya, konflik agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal. Tanah rakyat dirampas demi segelintir elit oligarki yang tidak pernah

puas. "Tercatat 68 persen tanah di Indonesia (hanya) dikuasai 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar, sementara lebih dari 16 juta petani bergantung hidup dari rata-rata lahan hanya di bawah setengah hektar saja, potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin mencapai Rp380 triliun."



TERCATAT 68 PERSEN TANAH DI INDONESIA (HANYA) DIKUASAI 1 PERSEN KELOMPOK PENGUSAHA DAN KORPORASI BESAR.

paparnya di Kanwil BPN Sumut, Selasa (4/4).

Politisi dari Fraksi PPP ini menjelaskan, dalam lima tahun terakhir paling tidak sebanyak 2.288 konflik agraria terjadi, sebanyak 1.437 orang dikriminalisasi karenanya, 776 orang dianiaya, 75 orang tertembak dan 66 orang tewas di wilayah konflik agraria.

Masalah Pertanahan, khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL Komisi II berupaya mengawasi, memeriksa dan mengurai permasalahan HPL, HGU, dan HGB terkait sejumlah isu penting. Isu tersebut antara lain berapa luas lahan HPL, HGU, dan HGB yang dikuasai negara dan sektor swasta.

Komisi II DPR RI dalam pengawasan masalah pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL dalam mengkaji isu-isu strategis tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan agraria.

Urgensi pengawasan Komisi II DPR RI tentang Pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL salah satunya adalah memperkuat peran negara dalam melakukan pengelolaan aset berupa lahan atau tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam kaitan peran negara dalam mengelola aset berupa tanah berhubungan erat dengan keberadaan pemberian perizinan HGU, HGB dan HPL yang kerap bermasalah misalnya tumpang tindih pemilikan izin, hingga lahan terlantar. **ssb/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Berbatasan IKN, RDTR di Kaltim Perlu Sinergi Antar Lembaga dan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyampaikan pentingnya sinergisitas antar lembaga dan pemerintah terkait penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Kalimantan Timur. Mengingat, Kalimantan Timur kini tengah menjadi pusat perhatian karena sebagian daerahnya akan menjadi dan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara (IKN).

"Kita tadi kita minta keterangan, penjelasan, informasi baik dari kepala kantor wilayah BPN Kalimantan Timur maupun juga tadi ada hadir Kepala Dinas PUPR dari Provinsi Kalimantan Timur. (Sinergisitas antar lembaga) penting karena kita mengharapkan bahwa penataan ruang ini dilakukan secara integral tidak parsial, antara pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian ATR BPN, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota bahkan disini nanti ada otorita," jelas Saan usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kalimantan Barat, Selasa Petang (4/4).

Selain itu, menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, sinergisitas dan kolaborasi ini penting dalam upaya menata wilayah dengan RDTR yang baik, karena hal ini akan menjadi tumpuan harapan semua *stakeholder* termasuk masyarakat apalagi ini terkait dengan soal ibukota baru. "Kebersamaannya sama-sama memiliki komitmen dan keberpihakan bagaimana menata wilayah itu dengan tata ruangnya yang benar-benar bisa menjadi tumpuan harapan semua," ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga menilai, beberapa daerah kerap abai terkait keseriusan RDTR ini. Ia menjelaskan, harusnya kesadaran mengenai hal RDTR ini dipandang serius oleh setiap provinsi, termasuk juga Kalimantan Timur, yang mana sebagian wilayahnya akan menjadi dan berbatasan dengan IKN.

”

"KEBERSAMAANNYA SAMA-SAMA MEMILIKI KOMITMEN DAN KEBERPIHAKAN BAGAIMANA MENATA WILAYAH ITU DENGAN TATA RUANGNYA YANG BENAR-BENAR BISA MENJADI TUMPUAN HARAPAN SEMUA,

"Misalnya, hanya beberapa daerah yang menempatkan persoalan tata ruang itu penting, yaitu dengan ditunjukkan adanya dinas tata ruang. Di sebagian daerah, tata ruang itu di-subkan ke dinas-dinas tertentu misalnya ke dinas PUPR. Ini menunjukkan bahwa mereka memang belum terlalu punya kesadaran tentang penting dan strategisnya terkait dengan soal penataan tata ruang," tegas Saan.

Di akhir wawancara, Saan pun berharap bahwa seluruh *stakeholder* di Kalimantan Timur meningkatkan lagi sinergisitasnya terkait RDTR ini. Sehingga, proses-proses pembangunan di daerah bisa berjalan sesuai sebagaimana yang diharapkan, tanpa terjadinya tumpang tindih kebijakan.

we/aha



FOTO: WE/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kalimantan Barat, Selasa Petang (4/4/2023).



Nasir Djamil: Kalau Pemerintah Ada Kemauan, Maka Akan Jalan RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan RUU Perampasan Aset Tindak

Pidana merupakan RUU yang diusulkan pemerintah. Karena itu, ia menekankan pembahasan RUU tersebut hanya akan jalan kalau pemerintah ada kemauan, yaitu mengirimkan draf Naskah Akademik dan RUU tersebut kepada DPR.

"Belum bergerak dia (RUU Pemberantasan Aset). Jadi kalau memang pemerintah ada kemauan, maka akan ada jalan. Kalau tidak mau, tidak ada jalan. Ini RUU-nya usul pemerintah," ujar Nasir Djamil saat dihubungi **Parlementaria**, Sabtu (1/4).

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset ini juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas dan terintegrasi. Sebab, tanpa dua hal tersebut, maka RUU ini, menurutnya, hanya akan menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang. "Karena itu, menurut saya memang RUU Perampasan Aset itu dibutuhkan," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menjelaskan yang dimaksud dengan penegakan hukum berintegritas adalah melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kemenkumham. Sedangkan, penegakan hukum yang berintegritas adalah penegakan hukum yang memang berdasarkan sistem, bukan karena ada kasus viral terlebih dahulu baru ada penegakan hukum.

"Kalau tidak ada jaminan seperti itu, saya khawatir UU ini akan

dijadikan senjata untuk menembak orang yang belum tentu bersalah. Menembak lawan politik atau orang

”

BELUM BERGERAK DIA (RUU PEMBERANTASAN ASET). JADI KALAU MEMANG PEMERINTAH ADA KEMAUAN, MAKA AKAN ADA JALAN. KALAU TIDAK MAU, TIDAK ADA JALAN. INI RUU-NYA USUL PEMERINTAH.

yang berteman dengan lawan politik. Jadi, harus dipastikan dulu penegakan hukum kita ini. Jadi kalau penegakan hukum ini sudah berintegritas, maka kita percaya dengan penegakan hukum itu," tegasnya.

Komisi III, tegasnya, siap jika ditugaskan Badan Musyawarah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut dengan pemerintah. "Itu kan tergantung Bamus nanti, siapa yang menugaskan pembahasan RUU tersebut. Apakah Pansus, Komisi III, atau Baleg, tapi kan dia (RUU Pemberantasan Aset) bukan prioritas tahunan, dia hanya *long list*," tutupnya.

— /rdn



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Tidak Ada Data Acuan Yang Valid, Legislator Tolak Kebijakan Impor Bapanas

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional. Penolakan ini terjadi karena menurutnya saat ini tidak ada yang valid lantaran data yang dimiliki pengelola pangan saat ini masih berbeda. Untuk itu, menurutnya kebijakan ini kebijakan salah kaprah.

"Saya sama dengan Pak Suhardi Duka, saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya pak ketua, ini kebijakan salah kaprah karena didasari atas data yang tidak valid. masing-masing pengelola baik

”

SAYA SAMA DENGAN PAK SUHARDI DUKA, SAYA MENOLAK KEBIJAKAN IMPOR INI. KEBIJAKAN IMPOR INI MENURUT SAYA PAK KETUA, INI KEBIJAKAN SALAH KAPRAH.

ID food maupun Badan pangan tadi pak ketua, ini beda-beda datanya," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (3/4).

Politisi Fraksi PKS itu pun mengusulkan untuk membentuk Tim Panja atau mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait dengan data yang akan dijadikan acuan oleh pengelola pangan. "Soal-soal data ini pak ketua biar *clear*: data mana yang kita jadikan acuan? kalau betul kita tidak percaya kepada BPS, lantas data apalagi yang perlu kita pakai yang perlu kita percaya? Nah Kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan. Mari kita sepakati bersama-sama. undang semua *stakeholder* Komisi IV yang bicara tentang pangan ini," tuturnya.

Lanjutnya, diskusi mengenai data ini perlu dilakukan untuk menentukan data acuan yang menjadi penentu kebijakan-kebijakan terkait dengan pangan nantinya.

"Kita sepakati ini data acuan kita, ini acuan produksinya dan kebutuhannya. sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya tidak setuju kebijakan impor ini. karena salah kaprah menurut saya," pungkasnya. gal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.



FOTO: AFR/PDT

KKP Diminta Usulkan Pembukaan 'Automatic Adjustment' Anggarannya Pada Kemenkeu

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mengungkapkan pihaknya mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuka *automatic adjustment* anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023. *Automatic*

adjustment diketahui merupakan mekanisme pencadangan belanja kementerian atau lembaga yang diblokir sementara pada pagu belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2023.

"Saya kira *automatic adjustment* ini sudah berkali-kali kita bahas, dan kita setuju dan mendorong Kementerian kelautan dan perikanan untuk mengusulkan kementerian keuangan untuk membukanya. Tapi sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Apalagi persoalannya?," tanya Suhardi dalam Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Diketahui, dari hasil rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 29 Maret 2023 bahwa Pagu alokasi anggaran belanja kementerian tersebut adalah sebesar Rp6,29 Triliun. Dimana sekitar Rp468,16 Miliar diantaranya terkena *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan.

Pada hal anggaran tersebut sangat dibutuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat dan nelayan, seperti pengadaan alat dan sarana penangkapan ikan.

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini kembali mendorong mitra kerjanya tersebut untuk mengusulkan pembukaan *automatic adjustment* itu kepada Kementerian Keuangan. Hal tersebut semata untuk berjalannya program bantuan untuk masyarakat dan nelayan tersebut.

ayu/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

FOTO: ARI/PDI

Legislator Minta Evaluasi Penerimaan Taruna-Taruni STMKG

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi meminta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) melakukan proses rekrutmen taruna taruni dengan jumlah kuota reguler dan afirmasi seperti tahun tahun sebelumnya dan ditingkatkan. Hal ini disampaikan Fauzi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke STMKG di Kota Tangerang (6/4).

"Penerimaan Taruna Taruni STMKG yang hanya berdasarkan zona yang dianggap urgen untuk Sumber Daya

Manusia yang baru menurut saya perlu di diskusikan karena bencana alam hampir terjadi di seluruh Indonesia, semua daerah berpotensi bencana alam," ujar Fauzi.

Politisi Fraksi Golkar ini juga menyangkan sistem zonasi yang digunakan dalam rekrutmen taruna taruni STMKG pada tahun ini yang hanya menggunakan jalur afirmasi untuk putra putri daerah timur Indonesia. "Jika mengandalkan zonasi seperti ini saya anggap kurang tepat karena harus di korelasikan dengan luas daerahnya, jika

”

PENERIMAAN TARUNA TARUNI STMKG YANG HANYA BERDASARKAN ZONA YANG DIANGGAP URGENT UNTUK SUMBER DAYA MANUSIA YANG BARU MENURUT SAYA PERLU DI DISKUSIKAN KARENA BENCANA ALAM HAMPIR TERJADI DI SELURUH INDONESIA, SEMUA DAERAH BERPOTENSI BENCANA ALAM.

hanya ukurannya di provinsi mungkin tepat tapi harus dilihat ada berapa kabupaten kota di daerah tersebut apakah sudah mencukupi," katanya saat ditemui **Parlementaria**.

"Maka harus dibuka banyak pendaftaran taruna taruni yang ada diseluruh Indonesia bukan hanya menggunakan sistem zonasi maka masyarakat nantinya akan lebih banyak menerima informasi dan sosialisasi bagaimana jika daerahnya terkena bencana alam," sambung Fauzi.

Seperti diketahui tahun ini STMKG tidak melakukan pendaftaran secara reguler hanya menerima pendaftaran untuk putra-putri daerah Papua dengan kuota sebanyak 80 orang, yang pada tahun sebelumnya total penerimaan taruna-taruni STMKG yang berasal dari jalur reguler dan putra-putri Papua dengan total 250 orang.

 pdt/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hamka Baco Apresiasi Peningkatan Persiapan Mudik via Tol Merak Banten



FOTO: SYN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Banten, Jumat (14/4/2023).

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengapresiasi persiapan pemerintah dan mitra dalam mengatasi lonjakan pemudik jalur darat via Tol Merak, Banten. Hal ini ia sampaikan kepada **Parlementaria** usai meninjau langsung Tol Merak dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Banten, Jumat (14/4).

"Ini tiap tahun kan pekerjaan rutin bagi setiap lembaga, utamanya yang bergerak di bidang jasa pengangkutan. Pertama, di Merak ini yang kami lihat pada prinsipnya persiapan-persiapan dasarnya sudah oke, cuma saya harus memperjelas dulu apa yang berbeda dengan tahun lalu. Yang pertama adalah *rest area*-nya itu ditambah, yang kedua alur keberangkatan itu dibagi dua, reguler dengan bisnis. Sehingga

”

INI TIAP TAHUN KAN PEKERJAAN RUTIN BAGI SETIAP LEMBAGA, UTAMANYA YANG BERGERAK DI BIDANG JASA PENGANGKUTAN. PERTAMA, DI MERAK INI YANG KAMI LIHAT PADA PRINSIPNYA PERSIAPAN-PERSIAPAN DASARNYA SUDAH OKE, CUMA SAYA HARUS MEMPERJELAS DULU APA YANG BERBEDA DENGAN TAHUN LALU.

semua persoalan-persoalan yang bisa terjadi itu terselesaikan dengan baik," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hamka menilai di setiap tahunnya perlu dilakukan perubahan yang signifikan agar bisa menyelesaikan persoalan kemacetan dikarenakan volume kendaraan yang bertambah. Salah satunya dengan menyiapkan skenario A, B, dan seterusnya. Agar jika salah satu plan tidak berjalan, mitra bisa mengeksekusi plan lain sehingga tidak mengganggu kelancaran mudik lebaran tahun ini.

"Oleh karena itu, harus ada plan A, harus ada plan B. Kalau terjadi *crowded* misalnya mulai dari awal start-nya mobil dari pintu tol itu sudah harus diatur sedemikian rupa. Karena antara *outflow* dengan *inflow* itu tinggi sekali perbedaannya. Sehingga kalau tidak diatur antara *outflow* dan *inflow*-nya, kendaraan yang masuk itu akan numpuk. Oleh karena itu, semua planning seperti ini, itu sudah dipersiapkan, ada alternatif yang dilakukan, terutama jalur-jalurnya ada penambahan pelabuhan penumpang. Jadi ada sudah ada dua tempat selain yang ada di sini, ada lagi satu tempat yang lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan," jelas Hamka.

Terakhir, Hamka mengingatkan kepada pengelola untuk bisa memaksimalkan plan A dan plan B yang telah dibuat, dan melakukan koordinasi dalam penguraian *inflow* dan *outflow* dalam rangka mengatasi penumpukan kendaraan selama masa mudik lebaran. Ia berkeyakinan bahwa selalu ada perubahan yang lebih baik dari tahun ke tahun soal pengelolaan kemacetan ini. **syn/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Herman Khaeron Minta Rantai Logistik Dijaga Selama Mudik

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta *stakeholder* terkait untuk mengantisipasi datangnya musim Mudik Lebaran 2023 demi menjaga rantai logistik tetap lancar dan aman. Baginya, peristiwa ini akan mendorong pergerakan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara signifikan.

"Menurut saya, akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi masyarakat di daerah tujuan. Dengan catatan bahwa kondisi jalan, kondisi pergerakan orang dan barang ini bisa dijamin secara lancar. Kalau tidak hati-hati, daya beli bisa menurun karena biaya pergerakan semakin mahal dan kemudian daya belinya akan

tertekan," kata Herman dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).

Oleh karena itu, dengan potensi jumlah pemudik mencapai 123,8 juta orang, ia berharap rantai logistik tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Membahas 'Menilik Kesiapan Pemerintah Hadapi Mudik Lebaran 2023', Politisi Fraksi Partai Demokrat itu meminta agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan kelancaran arus mudik, baik arus darat, udara, maupun laut.

Aspek ini, menurutnya menjadi krusial karena turut berkontribusi menekan biaya pengeluaran logistik. "Pasti tingkat kebutuhan akan meningkat di daerah tujuan. Kalau

tingkat permintaannya meningkat, tingkat *supply*-nya ya harus cukup ya. Jadi, seluruh pergerakan barang dan jasa yang bergerak pada saat yang sama, bisa dijamin kelancarannya. Kalau tidak, daya belinya semakin turun, inflasinya sudah pasti akan meningkat," terangnya.

Perlu diketahui, berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mudik Lebaran Tahun 2023 diperkirakan memberikan dampak ekonomi hingga mencapai sekitar Rp150 triliun. Dengan ditiadaknya aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia, persepsi positif dari masyarakat Indonesia terhadap kegiatan mudik menjadi semakin membaik. — **ts,frs/rdn**



FOTOGU/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (tengah) saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Anggota DPR Dorong Peningkatan Keterwakilan Pekerja Perempuan di PT Smelting

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mendorong peningkatan keterwakilan pekerja perempuan pada PT Smelting yang terletak di daerah pemilihannya di Gresik, Jawa Timur. Menurut Roro, adanya PT Smelting yang

kini sedang menggarap pekerjaan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi *smelter* tembaga 30 persen dari kapasitas sebelumnya memberikan dampak ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitar.

"Oleh karena itu butuh kebijakan khusus dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pekerja lokal maupun masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik, atau fasilitas industri ini. Karena kebetulan saya sudah berkali-kali menyerap aspirasi masyarakat terkhusus para buruh juga menanyakan berbagai macam hal, mengenai bagaimana keterlibatan mereka, keterwakilan perempuan," ujar Roro kepada

Parlementaria, di Gresik, Jawa Timur, Rabu (5/4).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam kesempatan yang sama juga mengutarakan harapannya agar dapat dilakukan peningkatan sumber daya manusia pada pekerja, khususnya pekerja yang berasal dari masyarakat lokal Gresik. Sehingga *multiplier effect* dari adanya pabrik peleburan dan pemurnian tembaga pertama di Indonesia tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

"Tadi juga saya menegaskan bahwa tolong untuk peluang pekerjaan untuk para perempuan juga bisa ditingkatkan, lalu kemudian jika ada *training* khusus baik itu untuk perempuan ataupun lintas *gender*, intinya keseluruhan, juga dapat dilakukan. Saya mohon akan dilakukannya peningkatan SDM di wilayah Gresik terkhusus di *ring 1* hingga *ring 2* nya, dan saya berharap sekali bahwa terciptanya *multiplier effect* dari keberadaan industri ini," harapnya.

Diketahui, hingga saat ini total 80 persen pekerja di PT Smelting merupakan pekerja lokal yang berasal dari Gresik dan sekitarnya. Sementara, keterwakilan pekerja perempuan masih sebanyak 10 persen dari total pekerja. **bia/aha**



FOTO: BIA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Gresik, Jawa Timur, Rabu (5/4/2023).

PT Amman Harus Serius Susun 'Blueprint CSR' Demi Kesejahteraan Rakyat



FOTO: GAL/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI di NTB.

Komisi VII DPR RI pada masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke smelter yang dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (6/4). Selain melihat progres pembangunan smelter, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu juga turut mendesak PT Amman untuk serius dalam menyusun *blueprint* program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kesejahteraan rakyat terutama masyarakat Sumbawa.

Pertama, Adian meminta PT Amman untuk dapat mengalokasikan 30 persen dana anggaran CSR diperuntukan bagi anak-anak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan

”

MASA ALAMNYA (DIAMBIL DARI) ALAM DI SINI, EMASNYA DARI SINI, PENGUSAHANYA YANG DATANG DARI JAKARTA, DARI TEMPAT LAIN. RAKYAT INI DAPAT APA?

sekolah pada jenjang strata-1 (S-1) hingga strata-3 (S-3). "Bisa *nggak* disisa rentang waktu ini kita buat peta konsep? Dan alokasikan saja 30 persen dari total anggaran CSR per tahun untuk beasiswa. Jadi ketika PT Amman pergi dari sini, paling tidak mencetak 5 ribu-6 ribu sarjana. Kita harus berpikir seperti itu," ucapnya.

Selain itu, PT Amman juga diminta untuk melibatkan pengusaha-pengusaha lokal dengan mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja tahunan PT Amman untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa diberikan kepada pengusaha lokal. "Masa alamnya (diambil dari) alam di sini, emasnya dari sini, pengusahanya yang datang dari Jakarta, dari tempat lain. Rakyat ini dapat apa?" tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menanggapi usulan Adian, Presiden Direktur PT Amman Rachmat Makkasau menyatakan persetujuannya mengenai pengalokasian dana CSR untuk program pendidikan sebanyak sekitar 30 persen per tahun tersebut. Namun hal ini berarti PT Amman harus melakukan perubahan *blueprint* CSR ulang untuk melakukan penyesuaian alokasi dana CSR tersebut.

"*Blueprint* kami sebenarnya sudah ada, tapi memang itu tidak mengacu pada provinsi tetapi itu tidak masalah, kami bisa menyesuaikan. Dan dalam *blueprint* itu yang bapak (Adian Napitupulu) sampaikan nanti bisa saja kami ikutkan juga termasuk dengan peningkatan-peningkatan sumber daya lokal seperti yang tadi bapak bilang," tuturnya.

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI dan PT Amman pun menyepakati untuk PT Amman segera menyelesaikan *blueprint* pengelolaan CSR tersebut dalam jangka waktu satu bulan dan nantinya akan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI. **gal/aha**



Netty Aher Desak Pemerintah Upayakan Pemulangan Korban TPPO Dede Asiah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan Pekerja Migran (PMI) non prosedural Dede Asiah, pekerja migran asal Karawang yang diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah.

"Kami mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan PMI Dede Asiah yang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Suriah. Korban TPPO berhak

mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Rabu (5/4).

Dede Asiah mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar USD 12.000 atau sekitar Rp180 juta ke Suriah. Netty mempertanyakan komitmen BP2MI untuk memberantas mafia penyalur PMI non prosedural.

Padahal komitmen tersebut digaungkan di seminar-seminar yang digelar pemerintah, tapi realisasinya masih jauh dan kasus-kasus terus datang silih

”

KAMI MENDESAK PEMERINTAH AGAR SEGERA MENGUPAYAKAN PEMULANGAN PMI DEDE ASIAH YANG JADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KE SURIAH. KORBAN TPPO BERHAK MENDAPAT JAMINAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN DIRI, JIWA DAN ATAU HARTANYA.

berganti. "Kenapa kejadian TPPO dan penyaluran PMI non prosedural terus saja berulang. Ini seperti ada mafia penyalur PMI yang dapat dengan leluasa melakukan aksinya. Apakah ada *backing* dari aparat?" tanya Netty.

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta kasus Dede Asiah menjadi cambuk bagi pemerintah, khususnya Kemenaker RI dan BP2MI, agar terus melakukan perbaikan sistem perlindungan PMI. "Komitmen moral harus dibuktikan dengan hasil riil di lapangan. Jangan hanya jargon, tapi korban terus berjatuhan. Ini menyangkut marwah dan martabat pemerintah Indonesia di mata rakyat dan dunia," tandasnya. [ann/aha](#)



FOTO: MUN/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Komisi IX Jamin Keterbukaan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Kesehatan

Komisi IX DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Dalam pembahasannya, Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan Komisi IX memastikan untuk membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU tentang Kesehatan ini seluas-luasnya.

"Komisi IX terbuka kepada semua yang ingin memberikan masukan terhadap UU ini. Kami berharap RUU tentang Kesehatan itu dapat menjawab segala persoalan tentang kesehatan di negeri ini," tegasnya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Menpan-RB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Staf Ahli Hukum kementerian dan Dirjen Perundang-Undangan dari kementerian hukum dan HAM di Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Hal itu juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia mengaskan spirit Komisi IX dalam pembahasan RUU tentang Kesehatan akan mengoptimalkan *public hearing*.

"Semangat kita (adalah) mendengarkan dari semua kalangan. Sehingga, ini bisa menjadi UU yang menjadi milik kita bersama (karena mengakomodasi semua masukan)," katanya.

Menkes Budi Gunadi menambahkan, Kemenkes sudah menggelar partisipasi publik massif terkait RUU tersebut. Ada 6011 masukan yang telah di jaring sejak tanggal 13-31 Maret 2023.

"Nah, dari enam ribu ini, 75 persen kita tindaklanjuti dan semua ada dokumentasinya secara digital," kata Menkes Budi.

Selanjutnya, Menkes Budi Gunadi menjelaskan topik paling ramai dibicarakan di publik yaitu mengenai Rumah Sakit (RS), Tenaga Kesehatan

(Nakes), aborsi, jaminan sosial, kemandirian Alat Kesehatan (Alkes). "Topik *website* lima besarnya kira-kira SDM, registrasi, perizinan, BPJS, pengelolaan nakes, dan RS," jelas Menkes Budi.

Sebagai informasi, RUU Kesehatan sebelumnya sudah dibahas dan melewati penyusunan naskah akademik di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya, RUU Kesehatan telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna tanggal 14 Februari 2023 lalu. RUU Kesehatan terdiri dari 20 bab dan 478 pasal. — rnm,ann/aha

”

**SEMANGAT
KITA (ADALAH)
MENDENGARKAN DARI
SEMUA KALANGAN.**



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska



Taman Baca Indahnya Pinggir Kali Semarang Diapresiasi Komisi X



FOTO: CAS/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti bersama rombongan tim usai mengunjungi Taman Baca Indahnya Pinggir Kali (Inpirli) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (6/4/2023).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti memberikan

apresiasi kepada masyarakat kecamatan Lamper Tengah, Semarang, Jawa Tengah, karena telah membuat Taman Baca Indahnya Pinggir Kali (Inpirli) yang sangat luar biasa untuk meningkatkan literasi khususnya pada usia anak-anak. Peralnya taman Inpirli tersebut dibangun dari dan untuk masyarakat sendiri.

"Peningkatan literasi tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah *an sich*, tentunya harus ada kerjasama dari semua komponen masyarakat. Saya memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat karena telah membuat Taman Inpirli untuk meningkatkan

literasi sejak dini," katanya saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP), Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (6/4).

Legislator Fraksi PDI-P itu menambahkan taman tersebut dapat berguna untuk meningkatkan literasi khususnya pada anak-anak yaitu terutama dari pihak keluarga. Oleh karena tanpa dikawal orang tua kesukaan minat baca tidak akan pernah tumbuh.

"Hal ini harus terus menerus dirawat, kalau di sekolah anak-anak tentu membaca tetapi kalau sudah sampai rumah bagaimana? apalagi jika orang tuanya sibuk bekerja, tentunya yang ada di lingkungan ini lah. Jadi, saya kira taman ini dapat menjadi sebuah *role model*," tambahnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah IV itu melanjutkan bahwa taman Inpirli bisa menjadi *role model* yang dapat diterapkan di banyak tempat. "Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi yang hampir merasa *desperate* bagaimana sebuah lingkungan tempat tinggal anak-anak itu tidak *secure* hari ini kita lega menemukan sebuah keamanan dan kenyamanan yang luar biasa untuk anak-anak," jelasnya.

Bukan hanya tempat membaca, Taman Baca Inpirli juga tempat menunjukkan kreativitas seperti menggambar, mewarnai dan menari. Di sisi lain, ibu-ibu juga membuat kerajinan tangan untuk menambah pendapatan keluarga, seperti membuat tahu, tempe dan membuat bank sampah. [cas/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rano Karno Dorong Pemerintah Buka Formasi Tenaga Pustakawan

Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno menyoroti permasalahan minimnya jumlah tenaga pustakawan secara nasional. Ia mengatakan, masalah kurangnya tenaga perpustakaan menjadi krusial di tengah keprihatinan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Dia menyebutkan, skor kemampuan membaca anak Indonesia berada pada dalam urutan 6 (enam) terbawah dari 80 negara berdasarkan survei yang diadakan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018. Kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata skor negara OECD adalah 487.

"Perpustakaan tidak mungkin berjalan tanpa disiplin ilmu Perpustakaan. Karena itu, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini juga harus membuat formasi untuk tenaga pustakawan," ujar Rano Karno usai Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI ke Gedung Perpustakaan Umum Saija Adinda, di Jl. Rt Hardiwinangun, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (6/4).

Rano menyampaikan, ada tiga komponen yang diperlukan untuk meningkatkan literasi yaitu aktor, kultur dan infrastruktur. Dalam hal ini, aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan. "Jadi bagaimana bisa meningkatkan literasi, jika perpustakaan tidak dikelola oleh

pustakawan," beber Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Rano mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X bersama Kepala Perpustakaan Muhammad Syarif Bando sebelumnya, dikemukakan Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 orang. Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri, swasta, maupun perguruan tinggi.

Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus berlangsung, karenanya pemerintah harus segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan rekrutasi dan sistem pembinaan pustakawan yang terstruktur. Hal ini agar keberadaan perpustakaan sebagai jantung pendidikan masyarakat dapat sinergis dengan tantangan dan perkembangan tuntutan di era global.

Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno.

Sisi lain, lanjut dia, sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun sehingga perlu regenerasi. Dirinya juga menyarankan, kelembagaan perpustakaan sebaiknya jangan digabung dengan arsip. Karena hal itu berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda.

Selanjutnya, Rano Karno mengemukakan harapan tersedianya akses internet untuk publik, bantuan untuk pengembangan literasi digital, pengembangan serta pelatihan bagi tenaga perpustakaan, hingga pentingnya kolaborasi antara perpustakaan, lembaga pendidikan dan perusahaan.

ann/rdn

FOTO: ANE/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Langkah GNPIP Bank Indonesia Kendalikan Inflasi Jelang Idulfitri

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny mendukung langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), khususnya dalam menghadapi musim lebaran atau Hari Raya Idulfitri 1444 H / 2023 M. Sebab, menurutnya, inflasi adalah hal yang tidak bisa dihindari, baik selama Ramadan maupun Idulfitri.

"Karena itu kami mendukung GNPIP oleh BI, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kemarin diadakan di Purwakarta yang dilakukan dalam rangka menekan inflasi ini. Jadi mau tidak mau BI harus turun tangan dan kami mendukung langkah yang dilakukan BI," ujar Jefry kepada **Parlementaria**, usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/4).

Menurutnya, inflasi di Jawa Tengah (Jateng) secara umum mengalami penurunan meskipun tetap saja lebih tinggi di atas angka nasional. Diketahui, dalam Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Februari 2023, Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan IV 2022 sebesar 5,63 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,40 persen;yoy).

Namun demikian, inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan nasional (5,51 persen;yoy) dan wilayah Jawa (5,27 persen;yoy). Sedangkan Inflasi



FOTO: RDN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/4/2023).

”

KARENA ITU KAMI MENDUKUNG GNPIP OLEH BI, GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI PANGAN. KEMARIN DIADAKAN DI PURWAKARTA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MENEKAN INFLASI INI. JADI MAU TIDAK MAU BI HARUS TURUN TANGAN DAN KAMI MENDUKUNG LANGKAH YANG DILAKUKAN BI.

tahunan tertinggi terjadi di Kota Surakarta, dan terendah adalah Kota Semarang.

Karena itu, ia menyarankan kepada BI agar penanganan inflasi tersebut harus diukur secara efektivitasnya. Sehingga, strategi yang dilakukan haruslah yang memiliki dampak besar di masyarakat agar dapat mengendalikan inflasi.

"Karena di saat momen Idulfitri mobilitas itu menjadi tinggi. Kemudian kebutuhan pangan sudah pasti meningkat, dan ketika terjadi kebutuhan permintaan biasanya terjadi permintaan harga pula, berarti inflasi adalah suatu konsekuensi," tutup Politisi Partai Gerindra ini.

rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pinjol Ilegal Marak, Literasi Keuangan Masyarakat Perlu Diperkuat

Banyak pinjaman *online* (Pinjol) dan investasi ilegal bertebaran di media sosial. Namun, tawaran menggiurkan itu dapat menjadi jerat apabila masyarakat tidak mendapatkan edukasi. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia meminta Otoritas Jada Keuangan (OJK) untuk terus menyosialisasikan literasi keuangan kepada masyarakat.

"Edukasi perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan literasi

keuangan masyarakat. Karena jika tingkat literasi keuangan tinggi maka masyarakat tidak akan terjerat pinjaman online ilegal," kata Indah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RU dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja yaitu OJK, BNI, BRI, BANK mandiri, BTN, dan Bank Jawa Timur di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/4).

Legislator dari Dapil Jatim I itu mengatakan *platform* pinjaman online ilegal meski sudah banyak

”

EDUKASI PERLU DILAKUKAN SECARA RUTIN UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN MASYARAKAT. KARENA JIKA TINGKAT LITERASI KEUANGAN TINGGI MAKA MASYARAKAT TIDAK AKAN TERJERAT PINJAMAN ONLINE ILEGAL.

yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi tetap marak di masyarakat. Praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat ini perlu menjadi perhatian bagi industri jasa keuangan.

"Perlu keberpihakan industri jasa keuangan khususnya perbankan terhadap pembiayaan. Misalnya industri jasa keuangan (perbankan) membuat program yang tidak mempersulit masyarakat jika ingin meminjam," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Pasalnya, karena pengajuan pinjaman diperbankan sulit, maka masyarakat mencari alternatif lain melalui pinjol, karena kemudahan yang diberikan. "Sekali lagi, perlu keberpihakan industri jasa keuangan khususnya perbankan terhadap pembiayaan, di mana kita sama-sama ingin memperkecil *gap* antara inklusi dan literasi," tegasnya.  rnm/rdn



FOTO: RIA/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RU di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/4/2023).



Terima Masukan Pakar, Ibas: Optimis tapi Harus Tetap Waspada Hadapi Ketidakpastian Global

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono,

optimis dengan kemampuan moneter Indonesia. Meski begitu ia meminta berbagai pihak untuk tetap waspada menghadapi ketidakpastian global yang terjadi terutama pasca runtuhnya *Silicon Valley Bank* (SVB) beberapa waktu lalu.

"Bisa dikatakan kita cukup optimis, tapi sekali lagi, kita juga harus tetap waspada terkait dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini melihat (runtuhnya) SVB benar-benar mengguncang dan menjadi alarm bagi kita dan negara-negara berkembang," ujar politisi yang biasa disapa Ibas itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran DPR RI dengan para ahli, Kamis (6/4).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI Periode 2019-2022, Raden Pardede yang diundang dalam rapat menjelaskan kondisi perekonomian global dan permasalahan yang dihadapi saat ini termasuk kebijakan moneter yang diambil beberapa negara. Menanggapi paparan yang diberikan, Ibas bersyukur bahwa meski runtuhnya SVB sempat menyita perhatian dunia namun hal tersebut tak menimbulkan banyak dampak langsung terhadap Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mendukung perbankan untuk tetap menjaga kepercayaan diri, sekaligus memperingatkan agar jangan sampai



FOTO: JKA/PDT

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Anggaran DPR RI dengan pakar membahas dampak Kebijakan Moneter Internasional terhadap Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Inflasi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Kamis (6/4/2023).

ada kesalahan dalam menentukan regulasi kedepannya. Ia berharap tidak ada dampak ikutan dari kejadian SVP yang masuk ke Indonesia terlebih saat ini mulai banyak bisnis baru.

Dalam kesempatan yang sama, Legislator Jawa Timur VII itu juga

menyinggung mengenai startup yang digadang sebagai usaha dan investasi masa depan. Menurutnya usaha rintisan yang banyak diprakarsai oleh anak muda itu masih membutuhkan perbankan maupun modal ventura dalam mendukung pembiayaannya.

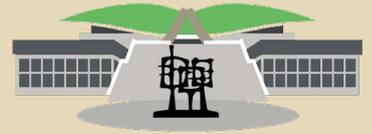
"Kita ketahui masih banyak memang di Indonesia ini yang usahanya *based on commodity*, tapi anak-anak muda sekarang bisnis dan investasi masa depannya bisa saja mengarah kepada startup-startup yang juga membutuhkan dukungan dari perbankan termasuk modal ventura padahal itu juga termasuk ekonomi baru yang kita juga nantikan untuk pendapatan negara jangka panjang," tambahnya. [uc/aha](#)

”

KITA KETAHUI MASIH BANYAK MEMANG DI INDONESIA INI YANG USAHA-USAHANYA BASED ON COMMODITY.

Scan QR untuk berita selengkapnya





Pustekinfo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Meningkatkan Keamanan Siber untuk Melindungi Data Dewan Perwakilan Rakyat di Ruang Command Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023). FOTO: RSB/PDT



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin Sosialisasi Struktur Organisasi Sekretariat DPR RI di Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (15/4/2023). FOTO: MRI/PDT

